

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok telah lama menjalin hubungan diplomatik ataupun hubungan bilateral. Kedua negara juga memiliki ikatan sejarah yang panjang serta memiliki ikatan budaya yang dekat. Dinamika hubungan kedua negara memiliki warna yang beragam disetiap era pemerintahan khususnya di Indonesia. Kedua negara sudah lama memiliki ikatan kerjasama yang baik dalam berbagai bidang dan terus berlangsung hingga saat ini.

Di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, hubungan Indonesia dan Tiongkok berada pada masa-masa yang istimewa. Hal ini dikarenakan kedekatan Presiden Joko Widodo dengan Tiongkok. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah sebagai upaya memperkuat hubungan kedua negara. Bahkan, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegeraan pertamanya dengan mengunjungi Beijing pada tahun 2014.

Muncul sebuah kebijakan yang memperbolehkan penggunaan tenaga kerja asing khususnya dari Tiongkok untuk datang ke Indonesia. Kebijakan tersebut langsung menuai pro dan kontra. Di satu sisi, Pemerintah dinilai salah dalam membuat kebijakan yang merugikan rakyat, disisi lain Pemerintah merasa perlu membuat kebijakan tersebut untuk sesuatu yang lebih besar dan akan memberi manfaat yang lebih besar pula. Kebijakan tersebut berbentuk Perpres No 20 tahun 2018, dan Permenaker No 35 Tahun 2015.

Dengan terbitnya kebijakan diatas, ribuan Tenaga Kerja Asing khususnya dari Tiongkok datang ke Indonesia. Kebijakan tersebut ditunjang dengan kebijakan pemerintah

memberikan akses bebas visa terhadap 169 negara didunia, termasuk didalamnya yaitu Tiongkok. Sehingga semakin mudah dan semakin cepat bagi warga negara Tiongkok untuk datang ke Indonesia.

Indonesia dibawah Pemerintaahan Presiden Joko Widodo memiliki kepentingan terhadap Tiongkok dengan dikeluarkannya kebijakan memperbolehkan izin bagi tenaga kerja asing khususnya dari Tiongkok. Kepentingan tersebut berupa keinginan Presiden Joko Widodo untuk mendatangkan investasi Tiongkok dalam rangka mendukung program pemerintah khususnya dalam bidang pembangunan. Pemerintah melihat bahwa Tiongkok adalah negara yang potensial untuk melakukan investasi di Indonesia. Fakta bahwa Tiongkok mengalami kemajuan ekonomi yang begitu pesat, didukung dengan semakin gencarnya Tiongkok menguasai perekonomian dunia merupakan alasan Pemerintah memfokuskan hubungan bilateral dengan Tiongkok.

Untuk mendatangkan Investasi Tiongkok, pemerintah harus melewati berbagai upaya dan prasyarat sebagaimana yang diajukan oleh Tiongkok. Adapun prasyarat investasi Tiongkok yaitu dengan membawa serta tenaga kerja Tiongkok untuk datang ke Indonesia. Sehingga pemerintah menyederhanakan izin tenaga kerja asing khususnya dari Tiongkok untuk datang ke Indonesia. Secara sederhana, kebijakan tersebut merupakan sebuah upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbolehkan investasi Tiongkok untuk datang ke Indonesia.

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa kebijakan memperbolehkan izin tenaga kerja asing khususnya dari Tiongkok untuk datang ke Indonesia lahir karena Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo menginginkan datangnya Investasi dari Tiongkok, dan untuk mendatangkan Investasi maka Indonesia harus

memenuhi prasyarat berupa menyederhanakan izin tenaga kerja asing khususnya dari Tiongkok.

Selain itu, Pemerintah juga berupaya mewujudkan nawacita Presiden Joko Widodo khususnya dalam bidang pembangunan. Pembangunan tidak bisa optimal apabila hanya mengandalkan anggaran dalam negeri atau menggunakan APBN, dibutuhkan suntikan dana dari luar negeri dalam bentuk investasi. Oleh karenanya, Pemerintah memperbolehkan izin tenaga kerja asing khususnya dari Tiongkok sebagai upaya untuk mendatangkan investasi dari Tiongkok. Tujuan utama investasi adalah untuk mendukung pembangunan nasional. Dengan melakukan pembangunan maka diharapkan Indonesia akan mengalami kemajuan ekonomi yang pesat.